

Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Deteksi Fraud Pada Aktivitas Audit (Survei pada Auditor BPKP Provinsi Jawa Barat)

Fauzan Habibie¹, Ajeng Luthfiyatul Farida², Koenta Adji Koerniawan³

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, fauzanhabibie@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ajengluthfiyatul@telkomuniversity.ac.id

³ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, koentaadji@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Deteksi *Fraud* merupakan suatu proses mengidentifikasi indikator-indikator kecurangan yang mengarah ke deteksi fraud sebagai salah satu kelakuan untuk mengetahui bahwa kecurangan terjadi siapa pelaku, siapa korban, dan apa yang menjadi penyebab terjadi *fraud* tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan independensi terhadap deteksi *fraud* pada aktivitas audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan data primer. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada auditor di Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Populasi penelitian ini adalah Auditor yang berada pada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria pengalaman kerja minimal 2 tahun pernah melakukan *auditing* dan minimal pendidikan S1 atau D IV. Sampel auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat 136. Peneliti mengambil sampel sebanyak 38 orang pemeriksa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Metode analisis dari penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 25. Berdasarkan hasil dari penelitian, menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap deteksi *fraud*. Secara parsial, kompetensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan, independensi berpengaruh positif terhadap deteksi *fraud*.

Kata Kunci-deteksi *fraud*, independensi, kompetensi,

Abstract

Fraud detection is a process of identifying fraud indicators that lead to fraud detection as an action to find out that fraud occurs who the perpetrators are, who the victims are, and what causes the fraud. This study aims to determine the effect of competence and independence on fraud detection in the financial statements of companies representing the BPKP of West Java Province. In collecting research data using primary data. Primary data in this study were obtained from the results of distributing questionnaires to auditors at the Representative of the West Java Province Audit and Development Agency. The population of this study were auditors who were at the Representative of the West Java Provincial Audit and Development Agency. The sampling technique used purposive sampling with the criteria of at least 2 years of work experience auditing and at least S1 or D IV education. Sample auditor of BPKP Representative of West Java Province 136. Researchers took a sample of 38 examiners based on predetermined criteria. The analysis method of this research is multiple linear regression analysis using SPSS 25. Based on the results of the study, it shows that competence and independence simultaneously affect fraud detection. Partially, competence has a positive effect on fraud detection, independence has a positive effect on fraud detection.

Keywords-competence, fraud detection, independence

I. PENDAHULUAN

Keberlanjutan pemerintahan di era globalisasi bergantung pada kemampuan mereka untuk mengikuti perkembangan dunia usaha. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas di berbagai aspek. Meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan melalui audit oleh auditor internal adalah salah satu cara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. *Fraud* merupakan sebuah tipu daya manusia yang dibuat untuk keuntungan personal yang merugikan khalayak banyak. Meskipun memiliki makna yang lebih dalam dalam hukum, rincian tentang penipuan berbeda-beda di berbagai wilayah hukum (Koerniawan, 2024:167). *Fraud* dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk keuangan, bisnis, dan pemerintahan. Menurut ACFE (2023) *Fraud* ialah setiap kelakuan disengaja oleh personal atau sekelompok orang yang melanggar kepercayaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Para pelaku kejahatan sering mengeksploitasi

berbagai kekurangan dalam operasional, prosedur, regulasi, kekurangan staf dan juga control yang kurang ditingkatkan. Akhirnya dikejutkan oleh terlihatnya variasi penipuan atau kecurangan dalam dunia usaha.

Dalam menunjang kemampuan auditor mendeteksi kecurangan Pengetahuan memainkan peran yang sangat krusial dalam pelaksanaan tugas sebagai auditor. Pengetahuan yang dimaksud adalah mencakup pemahaman mendalam tentang industri bisnis klien, kemampuan dalam perencanaan audit yang efisien, keterampilan dalam menyusun skema audit yang efisien, dan kemampuan untuk bentuk yang berpeluang menimbulkan *fraud*. Semua aspek pengetahuan ini harus menjadi bagian integral dari kompetensi seorang auditor. Pasalnya, audit adalah sebuah pekerjaan dengan bahaya tinggi dan jika seorang auditor tanpa pemahaman yang cukup dalam bidang-bidang tersebut, maka dampaknya akan sangat signifikan. Tidak hanya pada karier pribadi auditor itu sendiri, tetapi juga pada reputasi profesi audit dan kantor akuntan publik yang mempekerjakannya (Rosiana et al.,2019). Menurut (ACFE) Indonesia, pemerintah menjadi salah satu organisasi yang sangat dirugikan oleh *fraud*. Berdasarkan pantauan (ICW, 2023) ada 9 modus dalam kasus korupsi, yaitu:

Tabel 1. 1. Tabel Modus Korupsi semester 1 Tahun 2022 di Indonesia

No	Kasus	Jumlah	Kerugian
1	Penyalahgunaan anggaran	303 kasus	Rp 18 Triliun
2	Kegiatan/proyek fiktif	91 kasus	Rp 543 Miliar
3	Mark Up	59 kasus	Rp 1.1 Triliun
4	Laporan fiktif	51 kasus	Rp 108 Miliar
5	Pungutan liar	24 kasus	Rp.26 Miliar
6	Perdagangan pengaruh	19 kasus	Rp 19 Triliun
7	Penyunatan/pemotongan	18 kasus	Rp 33 Miliar
8	Penerbitan izin ilegal	12 kasus	Rp 5 Triliun
9	Memperdaya saksi	2 kasus	-
	Jumlah	579 kasus	Rp 44 Triliun

Sumber: ICW,2022

Dari pemantauan yang telah dilakukan ICW tersebut maka dapat dilihat yang paling banyak dilakukan adalah modus penyalahgunaan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 44 triliun. Hal ini tentu yang paling disayangkan karena akan mengakibatkan tidak optimalnya perekonomian. (Kompas.com,2022) diakses pada tanggal 20 November 2023. Peran auditor internal (APIP) dalam kewenangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan pandangan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu fenomenologi Giam & Budiarmo (2021). Saat ini peran auditor pemerintah menjadi sorotan publik karena banyaknya kasus-kasus yang terjadi di pemerintahan yang dipublikasikan melalui media elektronik. Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja di instansi pemerintah baik sebagai auditor internal pemerintah maupun auditor eksternal pemerintah yang sama-sama mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan sehubungan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan. Pemeriksa diminta dapat melaksanakan pekerjaannya secara efektif, baik keahlian yang didapat dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan teknis memadai. Dalam Widiyastuti, (2009) dikatakan bahwa kompetensi dibutuhkan agar pemeriksa dapat mendeteksi secara efektif dan tepat jika timbul adanya kecurangan serta dapat langsung mengetahui taktik rekayasa yang kemungkinan dijalankan pada saat melaksanakan penipuan tersebut karena dengan kompetensi yang dimiliki dapat membuat pemeriksa lebih peka terhadap *fraud*. Kompetensi dan independensi auditor yang tinggi diharapkan lebih dapat memahami gejala dan karakteristik-karakteristik kemungkinan timbulnya kecurangan yang terjadi, sehingga dapat dideteksi dan dapat dicegah sedini mungkin secara efektif. Pada penelitian yang dilakukan oleh Digdowiseiso (2022) Membuktikan bahwa kompetensi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Dengan demikian, Auditor yang sangat kompeten, memiliki potensi yang lebih besar untuk berhasil mendeteksi tindak kecurangan. Hal ini dikarenakan kompetensi tidak berdampak terhadap pendeteksian kecurangan (Eldayanti et al., 2020).

A. Teori Agensi

Teori ini adalah hipotesis yang berkaitan dengan prinsipal dan agen. Prinsipal sebagai pemilik perusahaan adalah pihak yang memberikan wewenang kepada agen dalam pengambilan keputusan dan tindakan organisasional. Terdapat masalah yang sering muncul antara prinsipal dan agen, yang disebut sebagai masalah agensi. Masalah ini keluar saat prinsipal dan agen mempunyai tujuan yang berbeda, sehingga membuat agen bertindak untuk memenuhi kepentingannya sendiri dengan mengesampingkan tugas yang diberikan oleh prinsipal (Eisenhardt 1989). Konflik antara prinsipal dan agen tidak hanya terjadi pada sektor swasta tetapi juga bisa terjadi pada entitas sektor publik (Arifah, 2012). Hal tersebut muncul karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan sehingga memungkinkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Teori keagenan ini dapat membantu kita memahami penipuan perusahaan. Misalnya, penipuan atau penggunaan dana perusahaan oleh agen. Keterlibatan dari dua belah pihak dalam suatu perusahaan, yaitu direktur Pihak lain berfungsi sebagai penengah, yaitu (pemilik) dan agen (manajemen). auditor. Agen akan menyusun laporan keuangan tentang aktivitas operasi perusahaan. yang mereka kendalikan. Dalam proses membuat laporan keuangan tersebut, agen mungkin saja mengubah laporan keuangan untuk kepentingan mereka, anggap relevan dengan bonus yang ingin Anda miliki. Untuk memastikan laporan keuangan seperti yang ditunjukkan, principal akan menyewa auditor untuk mengaudit laporan keuangan agen.

B. Teori Kejahatan Keraf Putih

Kriminalitas keuangan dan penipuan telah ada sejak awal perdagangan dikenal manusia. Falsafah laporan keuangan perusahaan publik pertama kali dilakukan oleh *East India Company* Inggris pada akhir tahun 1600 (Dorminey et al., 2012). Edwin H. Sutherland adalah orang pertama yang menggunakan istilah "kejahatan keraf putih" pada tahun 1940, ketika istilah itu dikaitkan dengan kekerasan di jalanan. Kejahatan yang berfokus pada kegiatan ekonomi dan bisnis dikenal sebagai kejahatan keraf putih. Sutherland mengatakan bahwa meskipun teori terdahulu tentang kriminalitas menganggap kesulitan finansial menjadi penyebab utama kejahatan, dalam kasus keraf putih, kemiskinan jarang menjadi penyebab utama kejahatan. Mereka berpendidikan, cerdas, kaya, individu yang cukup memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang memungkinkan mereka akses yang tidak dipantau ke sejumlah besar uang. Satu satunya cara satu kejahatan berbeda dari yang lain adalah dalam latar belakang dan karakteristik pelakunya (Okoye & Obialo 2020) Teori Kejahatan Keraf Putih sangat relevan dengan latar belakang penelitian karena melibatkan kecurangan dalam organisasi, terutama di BPKP Provinsi Jawa Barat. Menurut teori ini, kejahatan dilakukan oleh individu atau kelompok dengan posisi tinggi atau profesional, kaya dan memiliki pengetahuan cerdas dalam organisasi, serta biasanya berkaitan dengan kegiatan bisnis atau keuangan. Dalam kasus ini, tersangka dugaan penipuan terlibat dalam pelaporan keuangan yang dikelola pemerintah, yang menunjukkan kemiripan dengan ciri-ciri kejahatan keraf putih.

C. Fraud Pentagon

Dalam Situngkir & Triyanto (2020) Terdapat tiga teori utama kecurangan yang telah dikemukakan, diantaranya adalah fraud triangle, fraud diamond, dan fraud pentagon. Pada teori fraud triangle terdapat terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Diantaranya adalah terjadinya represi, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam teori fraud diamond ditambahkan satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan, yaitu faktor kompetensi. Teori fraud pentagon adalah sebuah teori perkembangan tindak penyelewengan terbaru yang dikembangkan oleh Crowe Howarth pada tahun 2011. Sebagian besar akademisi, yang tidak praktis, tidak tahu atau memahami siapa Crowe Horwath yang dianggap sebagai pencipta teori tersebut, sehingga mereka terkadang menyebutnya sebagai Teori *Fraud Pentagon Crowe*. Dalam (Syahira & Cahyaningsih, 2022) teori kecurangan terkini hingga saat penelitian ini disusun menyebutkan bahwa terdapat lima hal utama yang menyebabkan timbulnya kecurangan (*fraud pentagon*) yaitu represi (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*), dan arogansi (*arogantion*).

D. Audit Laporan Keuangan

Auditing adalah sebuah bentuk pemeriksaan yang dijalankan secara kritis dan sistematis terhadap sebuah laporan keuangan yang mana sebelumnya telah ditata sedemikian rupa oleh bagian manajemen, dengan tujuan pelaksanaannya untuk mampu membuktikan tingkat kewajaran dari laporan keuangan tersebut dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak teruji independen (Tambun, 2020:3). Selain itu menurut Koerniawan, (2024:165) *auditing* adalah pengumpulan serta pemeriksaan bahan bukti untuk mengidentifikasi dan Menyusun laporan mengenai perhitungan antara kesesuaian informasi dan kriteria yang ditentukan. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa *auditing* ialah pengeumpulan dan penilaian bukti informasi untuk membuat keputusan mengenai level kebenaran yang detail dengan standar yang di tetapkan. Dalam pelaksanaannya, audit harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan indepen. Dari pengertian *auditing* dan internal audit diatas bisa dinyatakan bahwa *auditing* ialah sebuah mekanisme pemeriksaan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok dengan kompetensi dan independensi yang baik sebagai lembaga pengawasan internal. Auditor BPKP bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan melaksanakan program pemerintah berjalan sesuai dengan

peraturan yang ditetapkan.

E. Deteksi Fraud

Frasa umum *fraud* sering disebut, seperti penipuan, pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, dan lain-lain. Berdasarkan (PSA) No 240 diterjemah sebagai salah penyampaian pada laporan keuangan bisa tampak akibat terjadinya kecurangan atau kesalahan. Elemen pembeda antara kecurangan dan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan adalah terletak pada unsur kesengajaan dalam tindakan yang mendasarinya. Kecurangan terjadi ketika terdapat niat untuk melakukan tindakan yang salah, sedangkan kesalahan terjadi tanpa adanya niat tersebut. Tanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan secara efektif terletak pada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan.

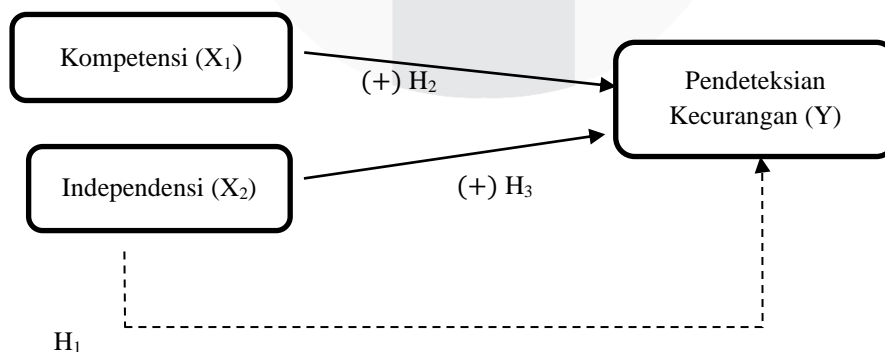
Fraud merupakan sebuah tindakan bodoh yang dilakukan demi keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Meskipun memiliki makna yang lebih dalam dalam hukum, rincian tentang penipuan berbeda-beda di berbagai wilayah hukum. (Koerniawan, 2024:167). Kecurangan sebagai penipuan kriminal yang bertujuan memberikan profit kepada si penjahat (Efendi et al., 2022). *Fraud Crimes* yang marak terjadi di lingkungan bisnis dan sektor publik bersifat situasional, yaitu kejahatan yang terjadi karena adanya situasi yang menguntungkan Koerniawan et al (2022). Istilah "*criminal*" di sini merujuk pada setiap pelanggaran kritis yang sudah diniatkan. Pelaku kecurangan memperoleh manfaat finansial dan merugikan korban melalui tindakan tersebut. Kecurangan umumnya melibatkan tiga langkah, yaitu tindakan (*the act*), menyembunyian (*the concealment*), dan konversi (*the conversion*).

F. Kompetensi

Menurut SPKN (2017) menyatakan kompetensi merupakan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang, baik perihal pemeriksaan maupun bidang tertentu. Menurut Wibowo & Phil, (2007) menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasar pada keterampilan dan pengetahuan serta diperkuat oleh sikap pekerjaan yang dibutuhkan. Menurut Choirunnisa, (2022) disampaikan Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman mereka selama auditing untuk melakukan auditing dengan lebih teliti, cermat, dan objektif.

G. Independensi

Menurut peraturan BPKP Tahun 2019 Independensi adalah kebebasan dari keadaan yang membahayakan kemampuan aktivitas pengawasan intern untuk melakukan tanggung jawab pemantauan intern secara objektif. Menurut Mulyadi, (2011) Pendapat independensi merujuk pada suatu kondisi mental yang objektif, di mana seorang individu bebas dari segala bentuk pengaruh, baik dari pihak internal maupun eksternal. Hal ini menuntut seorang auditor untuk senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dalam mengevaluasi fakta-fakta yang ada, serta menerapkan Pertimbangan yang adil dan tidak memihak dalam merumuskan serta menyatakan pendapat. Tidak ada alasan bagi akuntan publik untuk memihak kepentingan individu tertentu. Akuntan publik dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Kejujuran ini harus tercermin dalam hubungannya dengan manajemen, pemilik perusahaan, kreditur, dan seluruh pihak lain yang bergantung pada hasil kerja akuntan publik. (Christiawan, 2002).



II. METODE PENELITIAN

Data primer dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi utama, dan data sekunder merupakan data kuesioner yang dibagi dan disatukan kembali kepada auditor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangun Provinsi Jawa Barat yang terdata pada maret 2024, serta data-data terkait sebelumnya yang diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu, artikel, dan buku referensi yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan penerapan teknik perhitungan statistik deskriptif. Selain itu, pendekatan analisis data juga dilakukan melalui regresi linier berganda. Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Auditor Perwakilan BPKP Jawa Barat. BPKP merupakan auditor eksternal pemerintah yang diharuskan oleh Undang-undang untuk memiliki independensi dan kompetensi yang mumpuni agar dapat mendeteksi secara cepat jika terjadi kecurangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor Perwakilan BPKP Jawa Barat yang masih bekerja per maret 2024 yaitu sebanyak 136 orang. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Jika peneliti memiliki pertimbangan khusus tentang cara mengambil sampel untuk tujuan tertentu, mereka dapat menggunakan metode pengambilan sampel purposive (Sekaran, 2011). Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut: (1) Pegawai tetap BPKP minimal masa kerja lebih dari 2 tahun dan minimal telah mempunyai pengalaman memeriksa lebih dari 2 kali. (2) Pegawai tetap BPKP yang telah mempunyai pengalaman memeriksa pada beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat. (3) Pegawai tetap BPKP (pemeriksa) berpendidikan Strata 1 atau DIV

Dengan mengacu pada definisi *purposive sampling*, dapat dinyatakan bahwa teknik pengambilan sampel ini memungkinkan peneliti untuk secara cermat memilih sampel yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian yang spesifik. Penulis mengambil sampel berdasarkan pemeriksa BPKP yang ada di Jawa Barat yang berjumlah 170 orang dengan jumlah pemeriksa sebanyak 136 orang, dan dari 170 pegawai tetap BPKP Jawa Barat peneliti mengambil 136 pemeriksa sebagai populasi selanjutnya peneliti mengambil sampel sebanyak 38 orang pemeriksa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas

Salah satu jenis pengujian instrumen pernyataan adalah uji validitas, yang menentukan apakah instrumen tersebut mampu mengukur metrik yang diinginkan peneliti dengan tepat. Alat statistik SPSS versi 25 digunakan dalam penelitian ini. Semua instrumen pernyataan dalam kuesioner valid dan layak digunakan; hasil perhitungan menunjukkan r tabel sebesar 0,32 item kuesioner atau korelasi yang lebih kecil dari r table. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa konsisten suatu instrumen dengan objek yang sama pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2021). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner yang dianggap kredibel memiliki nilai alfa Cronbach di atas 0,6. dan semua variabel memiliki nilai reliabilitas di atas 0,6.

B. Analisis Statistik Deskriptif

1. Pendeteksian Kecurangan (Y)

Hasil perhitungan pada pendeteksian kecurangan memperoleh skor 2.506, skor tersebut dibandingkan dengan skor ideal sebesar 2660 ($5 \times 14 \times 38 = 2.660$) memperoleh nilai sebesar 94.21% berada pada interval 84.00% - 100.00% berada pada kategori sangat baik. Ini berarti sebagian besar responden memberi tanggapan sangat setuju pada variabel pendeteksi kecurangan.

2. Kompetensi (X1)

Hasil perhitungan pada variabel kompetensi memperoleh skor 2325, skor tersebut dibandingkan dengan skor ideal sebesar 2.660 ($14 \times 5 \times 28 = 2.660$) memperoleh nilai sebesar 87.40 % berada pada interval 84% - 100% termasuk kategori sangat baik. Ini berarti sebagian besar responden memberi tanggapan setuju pada variabel kompetensi.

3. Independensi (X2)

Hasil perhitungan pada variabel independensi memperoleh skor 1715, skor tersebut dibandingkan dengan skor ideal sebesar 1.900 ($10 \times 5 \times 38 = 1.900$) memperoleh nilai sebesar 90.26% berada pada interval 84.0% - 100.00% termasuk kategori sangat baik. Ini berarti sebagian besar responden memberi tanggapan sangat setuju pada variabel independensi.

C. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, pengujian asumsi klasik melibatkan evaluasi terhadap distribusi normal variabel, keberadaan multikolinearitas, dan kondisi heteroskedastisitas dari model regresi. Tujuan uji asumsi klasik adalah untuk menghindari masalah asumsi statistik klasik dan memastikan bahwa data penelitian telah dilakukan secara tepat. Karena peneliti menggunakan data cross-section dengan tipe data primer, uji autokorelasi tidak akan dilakukan.

1. Uji Normalitas

Hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa setiap variabel yang dianalisis mempunyai nilai sig. lebih besar dari α (0,05), dimana nilai probabilitas sebesar 0.213 lebih besar dari 0.05 ($0,213 > 0,05$). Oleh karena itu menunjukkan bahwa data memiliki distribusi yang normal.

2. Uji Multikolinieritas

Nilai VIF untuk kedua variabel independen masing-masing kurang dari 10 ($X1: 1.298 < 10$; $X2: 1.298 < 10$), dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas di antara kedua variabel independen

3. Uji Heteroskedastisitas

diperoleh nilai signifikansi untuk kompetensi ($X1$) ($p=0,761$) $> 0,05$) dan independensi ($X2$) ($p=0,568 > 0,05$). Oleh karena itu, data menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

D. Analisis Linear Berganda

Persamaan regresi adalah pendekatan statistik yang digunakan untuk memprediksi pengaruh variable kompetensi dan independensi terhadap pedeteksi kecurangan.

Tabel 3.4.1 Koefisien Regresi (*Coefficients*)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29.585	6.962		4.250	0.000
	X1	0.297	0.118	0.362	2.522	0.016
	X2	0.403	0.140	0.414	2.889	0.007

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Menurut tabel 3.4.1, diketahui nilai persamaan regresi berganda $Y = 29.585 + 0.297X1 + 0.403X2$

E. Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi Atau (Uji R^2)

Tabel 3.5.1 Korelasi Determinansi Simultan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.668 ^a	.446	.414	3.90262

a. Predictors: (Constant), INDEPENDENSI, KOMPETENSI

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Uji R Square dipakai untuk menentukan seberapa besar pengaruh kompetensi dan independensi secara bersamaan terhadap pedeteksi kecurangan. Berdasarkan tabel 3.5, kami menemukan nilai determinasi, atau R Square sebesar 0,414, yang menunjukkan bahwa variable kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap pedeteksi kecurangan sebesar 41.4% secara bersamaan. Variable lain yang tidak diteliti mempengaruhi bagian yang tersisa, yaitu 58,6%.

2. Uji F

Tabel 3.5.2 Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)

ANOVA^a

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	428.828	2	214.414	14.078	.000 ^b
	Residual	533.067	35	15.230		
	Total	961.895	37			

a. Dependent Variable: KECURANGAN

b. Predictors: (Constant), INDEPENDENSI, KOMPETENSI

Berdasarkan tabel 3.5.2 disimpulkan bahwa kompetensi dan independensi secara stimultan berpengaruh terhadap pedeteksi kecurangan

3. Uji t

Tabel 3.5.3 Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29.585	6.962		4.250	.000
	KOMPETENSI	.297	.118	.362	2.522	.016
	INDEPENDENSI	.403	.140	.414	2.889	.007

a. Dependent Variable: KECURANGAN

Sumber: Data diolah SPSS 25 (2024)

Berdasarkan tabel 3.5.3 dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi(X1)

Nilai sig. sebesar $0.016 < 0,05$ dan t hitung $2.522 > t$ table 2.03, artinya variabel kompetensi berpengaruh signifikan secara parsial dalam mendeteksi kecurangan aktivitas audit.

2. Uji independensi (X2)

Nilai sig. sebesar $0,007 < 0,05$ dan $2.889 > t$ table 2.03, maka terdapat pengaruh antara independensi (X2) terhadap pedeteksi kecurangan (Y) artinya variabel independensi berpengaruh signifikan secara parsial dalam mendeteksi kecurangan aktivitas audit.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kompetensi Terhadap pedeteksi Kecurangan

Kompetensi adalah prasyarat utama bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik 2021, seorang auditor wajib memiliki keahlian teknis yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman kerja yang relevan di bidang audit. Dengan demikian, individu yang tidak memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan tidak dapat menjalankan profesi sebagai auditor. Dalam hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,016, lebih kecil dari 0,05, dan nilai t hitung yang diperoleh sebesar 2,522 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,03, hal ini menguatkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi (X1) terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan (Y). Koefisien kompetensi terhadap mendeteksi kecurangan sebesar 0.297, hal ini berarti semakin baik Tingkat kompetensi maka semakin baik dalam mendeteksi kecurangan. Hasil ini sesuai dengan penelitian oleh (Astuti & Sormin, 2019) diperoleh bahwa variabel kompetensi menunjukkan signifikansi dengan nilai 0,005, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Selain itu, nilai t -statistik untuk kompetensi adalah 2,893, melebihi nilai t -tabel sebesar 1,984. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kompetensi secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Koefisien positif menunjukkan bahwa kompetensi berkontribusi positif terhadap kemampuan tersebut dalam konteks penelitian pada tiga bank yang diselidiki. Didukung Penelitian oleh Solichin et al., (2022) menyimpulkan bahwa kompetensi auditor memiliki pengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.

2. Pengaruh Independensi Terhadap Pendeteksi Kecurangan

Mulyadi (2011) Pendapat independensi merujuk pada suatu kondisi mental yang objektif, di mana seorang individu bebas dari segala bentuk pengaruh, baik dari pihak internal maupun eksternal. Independensi ini sangat penting bagi auditor dalam menjalankan audit, menekankan perlunya tetap netral dan tidak memihak kepada pihak lain. Oleh karena itu dapat disimpulkan auditor independen cenderung menerapkan standar dan prosedur audit yang lebih ketat. Hal ini membantu dalam identifikasi dan pengujian area yang berisiko tinggi terhadap kecurangan. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi yang sebesar $0,0007 < 0.05$ dan nilai t hitung yang diperoleh sebesar $2,889 > t$ tabel sebesar 2,03, hal ini menguatkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi (X2) terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan (Y). Koefisien independensi terhadap mendeteksi kecurangan sebesar 0.403, hal ini berarti semakin baik independensi maka semakin baik dalam mendeteksi kecurangan. Hasil ini mendukung penelitian (Tarimushela et al., 2024), (Solichin et al., 2022) serta (Kartim, Sutisman, 2022) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Hasil ini berbeda dengan penelitian oleh (Astuti & Sormin, 2019) bahwa variabel independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi tindakan kecurangan yang terjadi di perusahaan perbankan yang diteliti (p -value = $0.083 > 0.05$)

IV. KESIMPULAN

Dari Output dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan dapat menarik kesimpulan tentang pengaruh dari variabel Kompetensi dan Independensi terhadap pendeteksian kecurangan pada aktivitas audit.pada Auditor

Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Secara parsial kompetensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan dan sementara itu independensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.

A. Saran Praktis

1. Melakukan pelatihan reguler bagi auditor dan pegawai internal tentang teknik-teknik pendeteksian kecurangan terbaru
2. Melakukan audit mendalam secara berkala pada area yang memiliki risiko tinggi terkait dengan kecurangan.
3. Mengimplementasikan kebijakan yang ketat terkait dengan etika bisnis dan pencegahan kecurangan serta memastikan bahwa semua pegawai memahami dan mematuhi kebijakan tersebut.

B. Saran Akademik

1. Bagi peneliti lain yang hendak melanjutkan penelitian ini disarankan agar menambahkan variabel tambahan untuk memperkaya hasil analisis yang telah dilakukan.
2. Bagi peneliti lain yang hendak melanjutkan penelitian ini disarankan untuk meningkatkan jumlah sampel untuk hasil yang lebih akurat.
3. Bagi peneliti lain yang hendak melanjutkan penelitian ini disarankan untuk memperluas penelitian ke perusahaan sejenis untuk hasil yang lebih beragam dan dapat digunakan sebagai referensi

REFERENSI

- ACFE. (2023). *Association of Certified Fraud Examiners*. <https://www.acfe.com/fraud-resources/global-fraud-survey>
- Agoes. (2014). *Auditing:Petunjuk Praktisi Akuntan Public*. file:///C:/Users/Hp/Downloads/354859-auditing-petunjuk-praktisi-akuntan-publi-01c3a4331.pdf
- Arifah, D. A. (2012). Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. *Jurnal Prestasi*, 9(1), 85–95.
- Armawan, I. S., & Wiratmaja, I. N. (2020). Pengaruh pengalaman, kompetensi, independensi dan fee audit pada kualitas audit. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1208–1220.
- Astuti, J. P., & Sormin, P. (2019). Pengaruh Independensi, Kompetensi Dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada Bank Panin, Bank CIMB Niaga, dan Bank Nationalnobu. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 123–142.
- Choirunnisa, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Auditor Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pendeteksian Fraud. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 119–128. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.10294>
- Christiawan, Y. J. (2002). Kompetensi dan independensi akuntan publik: refleksi hasil penelitian empiris. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 79–92.
- Darsana, I. M., Atmoko, A. D., EDT, R. W., Valenty, Y. A., Suryantari, E. P., Pande, J. S., Siregar, B. G., & Nuryanto, U. W. (2023). *Pengantar Akuntansi*. CV. Intelektual Manifes Media. <https://books.google.co.id/books?id=D17DEAAAQBAJ>
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Priadi, J. I. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud):(Studi Empiris Pada Auditor BPK RI di Jakarta Pusat). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2621–2627.
- Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M.-J., & Riley Jr, R. A. (2012). The evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579.
- Efendi, B., Mashdurohatun, A., & Wahyuningsih, S. E. (2022). The Reconstruction Of Values In Handling Terrorism Based On Pancasila. *International Journal of Law Reconstruction*, 6(1), 29–40.
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 465–494. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.787>
- Giam, R. S., & Budiarmo, N. S. (2021). Peranan Auditor Internal dalam Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Sebuah Pendekatan Kualitatif). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(2), 435–446.
- ICW. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022. [Www.Antikorupsi.Org](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf), 1–40. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan Tahun 2022.pdf>
- Kartim, Sutisman, M. Y. N. M. B. H. I. M. A. A. (2022). Independence and Competence on Audit Fraud Detection: Role of Professional Skepticism as Moderating. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 161. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.823>
- Koerniawan, K. A. (2024). *Fraud Theories and Deterrence Propeller* (Majidah, M. Galuh, S. Sri, & Hilda (Eds.)). <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/209057/slug/fraud-theories-fraud->

deterrence-propeller-perkembangan-teori-teori-fraud-dan-konsep-fraud-deterrence-propeller-the-deter-e-.html

- Koerniawan, K. A., Afiah, N. N., Sueb, M., & Suprijadi, J. (2022). Fraud Deterrence: The Management's Intention In Using FCP. *Quality - Access to Success*, 23(190), 292–301. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.190.31>
- Kompas.com. (n.d.). Tiga Modus Korupsi Paling Marak Menurut Data ICW Semester I 2022. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/09/183055282/tiga-modus-korupsi-paling-marak-menurut-data-icw-semester-i-2022>
- Messier, William F., Steven M. Glover, D. F. P. (2014). *Auditing & Assurance Service: A Systematic Approach*. Singapura: McGraw-Hill Irwin.
- Mulyadi. (2011). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat Jakarta.
- Nabila Fikri Syahira, & Cahyaningsih. (2022). Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer. *Riset, Jurnal Kontemporer, Akuntansi*, 2015.
- Okoye, K. R. E., & Obialor, U. G. (2020). Forensic investigation and forensic audit methodology: Remedy to fraudulent practices in a computerized work environment. *International Journal of Educational Benchmark*, 16(2), 1–10.
- Public, I. A. indonesia. (2021). *No Title*. <https://iapi.or.id/cpt-special-content/standar-audit-sa/>
- Rachmad, Y. E., Ilham, R., Indrayani, N., Manurung, H. E., Judijanto, L., & Laksono, R. D. (2024). *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Rosiana, P., Putra, I. M., & Setiawan, Y. A. (2019). Pengaruh kompetensi auditor independen dan tekanan anggaran waktu terhadap pendeteksian fraud. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 2(1), 45–52. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v2i1.47>
- Sari, N. P. (2021). *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Di Makassar)*. <http://repository.umpalopo.ac.id/1416/>
- Sekaran, U. (2011). *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Buku 1*.
- Situngkir, N. C., & Triyanto, D. N. (2020). *Detecting Fraudulent Financial Reporting Using Fraud Score Model and Fraud Pentagon Theory : Empirical Study of Companies Listed in the L . Q . 45 Index*. 23(3), 373–410. <https://doi.org/10.33312/ijar.486>
- Solichin, M., Sanusi, Z. M., Johari, R. J., Gunarsih, T., & Shafie, N. A. (2022). Analysis of Audit Competencies and Internal Control on Detecting Potential Fraud Occurrences. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 171–180. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100118>
- Tambun, R. (2020). *Handout Auditing*. PT Rel Karir Pembelajar. <https://books.google.co.id/books?id=QWsCEAAQBAJ>
- Tarimushela, G. B., Tri Tani, E., & Yuniarti, R. (2024). The Influence of Competency, Independence, Professional Skepticism on Fraud Detection on Financial Statements in The Regional Government of West Java Province. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(5), 4268–4276. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i5.1259>
- Wibowo, W., & Phil, M. (2007). *Manajemen kinerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Widiyastuti, M., & Pamudji, S. (2009). Pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (FRAUD). *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2).